

Konsep Kota 15 Menit : Peluang dan Tantangan Penerapannya pada Kota Pulau

Risal Rasyid¹, Pieter Thomas Berhиту², Elvira Florensia Metekohy³

^{1,2,3} Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: work.risalrasyid@gmail.com, patrickberhиту@gmail.com,
metekohyelvira@gmail.com

Abstrak

Kepulauan Banda Neira memiliki potensi budaya yang besar, namun banyak bangunan bersejarahnya tidak terawat dan aksesibilitasnya terbatas. Dengan luas hanya 3 km², perencanaan yang mendukung pejalan kaki dan pesepeda diperlukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peluang dan tantangan penerapan konsep 15 Minute City pada Pulau Neira. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi kondisi aspek fisik dan non fisik pada kawasan perkotaan Pulau Neira terutama yang berkaitan dengan kondisi komponen kota 15 menit pada kawasan perkotaan Pulau Neira, selain itu juga akan dilakukan analisis untuk dapat melihat peluang dan tantangan penerapan konsep kota 15 menit di Pulau Neira. Penelitian ini menemukan bahwa penyesuaian fasilitas berdasarkan kepadatan penduduk penting untuk mendukung prinsip kota 15 menit, di mana wilayah dengan kepadatan tinggi memerlukan lebih banyak fasilitas, sementara wilayah dengan kepadatan rendah memerlukan aksesibilitas yang baik. Tata letak fasilitas saat ini sudah memadai, memungkinkan akses dalam 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Keberagaman fasilitas mendukung integrasi sosial, namun penerapan teknologi digital masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akses layanan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kata Kunci: 15 Minute City, Aksesibilitas, Perencanaan Kota.

Abstract

The Banda Neira Islands possess significant cultural potential, yet many historical buildings are neglected, and accessibility is limited. With an area of just 3 km², planning that prioritizes pedestrians and cyclists is necessary. This study aims to explore the opportunities and challenges of implementing the 15-Minute City concept in Banda Neira. A qualitative research method is employed, beginning with an assessment of the physical and non-physical conditions in the urban area, particularly aspects related to the 15-Minute City components. The study finds that adjusting facilities based on population density is crucial for supporting the 15-Minute City principle, with high-density areas requiring more facilities, while low-density areas need better accessibility. The current layout allows access within 15 minutes on foot or by bicycle. The diversity of facilities supports social integration, but further digital technology implementation is needed to enhance service access and overall quality of life.

Keywords: 15 Minute City, Accessibility, Urban Planning.

Pendahuluan

Konsep *15 minute city* (Kota 15 menit) merupakan salah satu konsep dalam perencanaan dan perancangan kota yang bertujuan untuk membangun kembali lingkungan perkotaan, konsep ini pertama kali dikenalkan pada tahun 2016, oleh Carlos Moreno. Konsep tersebut dapat didefinisikan sebagai “pengaturan perkotaan dimana penduduk setempat dapat mengakses semua hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan mereka pada jarak yang tidak lebih dari 15 menit dengan berjalan kaki atau dengan sepeda” (Moreno et al., 2021)

Filosofi dasar konsep kota 15 menit didasarkan pada pengetahuan tentang perilaku spasial manusia, persepsi spasial dan temporal. Asal usul studi tentang perilaku manusia dalam dimensi spasial dan temporal dapat ditemukan terutama dalam platform analitis geografi perilaku, yang merupakan bagian dari paradigma positivis geografi modern pada abad ke-20. Menurut ahli geografi perilaku, manusia tidak memahami ruang di sekitarnya dengan cara yang sama. Persepsi yang tidak setara tersebut merupakan hasil dari proses mental berkelanjutan yang mencerminkan jumlah dan pengorganisasian informasi yang tersedia bagi seseorang (Matlovič, R., Matlovičová, 2015).

Walkability merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan konsep kota 15 menit, konsep *walkability* mendukung untuk menciptakan kota berkelanjutan yang saling terhubung dan mendapatkan lebih banyak manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan (Jahanmohan, 2016);(Ramadani et al., 2024). Sederhananya, *walkability* dapat berupa area yang memfasilitasi aktivitas berjalan kaki (Spoon, 2005);(Mulyadi et al., 2023). *Walkability* memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan kota, antara lain: 1) sebagai dasar bagi sebuah kota berkelanjutan (*sustainable*); 2) sebagai pendorong terjadinya aktivitas sosial; 3) sebagai pendorong peningkatan kesehatan mental dan fisik (Sondakh, 2017).

Kepulauan Banda Neira memiliki potensi kebudayaan yang sangat besar dan bahkan dikenal sebagai ikon wisata budaya wilayah Maluku (Surbakti, 2021). Potensi kebudayaan tersebut dapat dilihat dari berderetnya bangunan peninggalan kolonial, baik berupa rumah tinggal, benteng pertahanan, rumah pengasapan pala (perk), tempat peribadatan dan bangunan lainnya (Kastanya, 2016);(Anuraga, 2021). Permasalahannya adalah pada kondisi sekarang banyak dijumpai bangunan cagar budaya peninggalan kolonial tersebut tidak terawat dan bahkan rusak yang mana kondisi tersebut berpengaruh pada wajah dan citra kota Banda (Pahlevi et al., 2023). Permasalahan tersebut kemudian didukung dengan kondisi aksesibilitas dan pergerakan masyarakat yang kurang baik, misalnya banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi jaringan jalan yang sempit. Melihat luasan Pulau Neira yang tergolong kecil seluas 3 km² dan beberapa kawasan cukup bisa dijangkau dengan berjalan kaki maka perlu adanya perencanaan kawasan yang menitikberatkan pada pergerakan pejalan kaki atau pesepeda (Tanan et al., 2017);(Safira, 2022).

Kota 15 menit adalah sebuah konsep kota yang memungkinkan seluruh fasilitas vitalnya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menaiki transportasi

umum (Moreno, 2020). Kompleksnya kegiatan yang ada pada Pulau Neira tentunya menyebabkan intensitas aktivitas pergerakan yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya perencanaan dan perancangan kawasan yang menitikberatkan pada aktivitas berjalan kaki dan bersepeda (Septirisa, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan penerapan konsep Kota 15 Menit di Pulau Banda Neira, dengan fokus pada penciptaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan di mana penduduk dapat mengakses layanan penting dalam waktu 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Dengan mengidentifikasi kondisi fisik dan non-fisik kawasan serta menilai komponen seperti kepadatan, kedekatan, keberagaman, dan digitalisasi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manfaat dari aksesibilitas lokal dan integrasi sosial sekaligus menangani hambatan yang unik bagi kota di pulau. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya perencanaan kota berkelanjutan, mempromosikan pelestarian budaya lokal, dan memberikan wawasan praktis untuk mengembangkan lingkungan perkotaan yang efisien dan inklusif di pulau kecil.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi kondisi aspek fisik dan non fisik pada kawasan perkotaan Pulau Neira terutama yang berkaitan dengan kondisi komponen kota 15 menit pada kawasan perkotaan Pulau Neira, selain itu juga akan dilakukan analisis untuk dapat melihat peluang dan tantangan penerapan konsep kota 15 menit di Pulau Neira.

Data lapangan dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peluang dan tantangan penerapan konsep Kota 15 Menit di Pulau Neira. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan, ketersediaan fasilitas umum, aksesibilitas, serta pola mobilitas penduduk di Pulau Neira. Wawancara semi-terstruktur diterapkan untuk menggali pandangan dan persepsi masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan para ahli perencanaan kota terkait penerapan konsep ini. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami realitas lokal secara menyeluruh dan konteks spesifik yang memengaruhi penerapan konsep Kota 15 Menit. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif, seperti kendala budaya atau kebiasaan masyarakat yang berpengaruh terhadap mobilitas dan interaksi sosial.

Hasil dan Pembahasan

Komponen Kota 15 Menit di Pulau Neira

Analisis komponen kota 15 menit pada Pulau Neira dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen diantaranya adalah kepadatan,

kedekatan, keberagaman dan digitalisasi. Penjabaran setiap komponen kota 15 menit tersebut lebih rinci sebagai berikut:

Kepadatan (Density)

Dalam komponen kepadatan, analisis yang dipertimbangkan adalah berkaitan dengan kepadatan penduduk, jumlah orang per kilometer persegi dan kepadatan bangunan. Analisis ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar tingkat kepadatan penduduk dan bangunan per kilometer persegi. Berikut adalah data jumlah penduduk desa/kelurahan di Pulau Neira yang menjadi lokasi studi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Banda Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Klasifikasi Kepadatan Penduduk
1	Kampung Baru	3.057	5,70	536	Tinggi
2	Dwiwarna	921	1,40	658	Tinggi
3	Rajawali	891	2,95	302	Rendah
4	Merdeka	851	3,44	247	Rendah
5	Nusantara	1955	13,30	147	Rendah
	Total	7.675	27	1.890	

Sumber: Kecamatan Banda Dalam Angka, 2024 dan Analisis Tim, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa hal diantaranya, jumlah penduduk pada wilayah studi sebanyak 7.675 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi berada pada Desa Kampung Baru sebanyak 3.057 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Desa Merdeka sebanyak 851 jiwa. Luas wilayah studi seluas 27 Km2 dengan wilayah terluas berada pada Desa Nusantara seluas 13,30 Km2, sedangkan luas wilayah terkecil berada pada Desa Dwiwarna seluas 1,40 Km2. Kepadatan penduduk pada wilayah studi adalah 1.890 jiwa/km2, dengan tingkat kepadatan tertinggi berada pada desa Dwiwarna yaitu 658 jiwa/km2, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada pada Desa Nusantara yaitu 147 jiwa/km2.

Kedekatan (Proximity)

Analisis Promixity dalam konteks kota 15 menit bertujuan melihat sebaran sarana pendukung kawasan permukiman yang outputnya dapat berfokus pada peningkatan aksesibilitas dengan memastikan bahwa layanan dan fasilitas penting dapat dijangkau dalam waktu 15 menit oleh penduduk (Jahanmohan, 2016). Hal ini memungkinkan pengurangan waktu tempuh, promosi bisnis lokal, dan mendorong kehidupan berkelanjutan. Adapun sarana pendukung kawasan permukiman pada wilayah studi dirincikan sebagai berikut:

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di wilayah studi terdiri dari sarana pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan atau sederajat, dan Perguruan Tinggi. Sarana pendidikan tersebar menyeluruh

dalam wilayah studi, sehingga jangkauan dan aksesibilitas dari kawasan permukiman sangat terjangkau.

Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana yang menunjang kebutuhan rohani masyarakat khususnya dalam proses ibadah. Sarana peribadatan di wilayah studi berupa Gereja, Masjid dan klenteng. Sarana Peribadatan tersebar menyeluruh dalam wilayah studi, sehingga jangkauan dan aksesibilitas dari kawasan permukiman sangat terjangkau.

Sarana Kesehatan

Sarana pendidikan di wilayah studi terdiri dari sarana pendidikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum. Sarana pendidikan berada pada tengah – tengah kawasan permukiman, sehingga jangkauan dan aksesibilitas dari kawasan permukiman menuju Puskesmas dan Rumah sakit sangat terjangkau.

Sarana Perdagangan dan Jasa

Persebaran sarana Perdagangan dan jasa didominasi oleh Toko Klontong, swalayan, dan pasar tradisional. Sarana perdagangan tersebar menyeluruh dalam wilayah studi, sehingga jangkauan dan aksesibilitas dari kawasan permukiman sangat terjangkau. Namun untuk pasar tradisional hanya terdapat pada Desa Nusantara. Selain sarana perdagangan tersebut di wilayah studi juga terdapat sarana berupa warung makan, cafe, dan restoran. Sarana ini tersebar secara menyeluruh pada kawasan studi di 5 (lima) desa, sehingga dapat memudahkan masyarakat dan pengunjung untuk dapat mengakses sarana tersebut.

Sarana Perhotelan dan Penginapan

Sarana perhotelan dan penginapan di wilayah studi terdiri dari hotel, penginapan dan homestay. Sarana perhotelan dan penginapan tersebar menyeluruh dalam wilayah studi, dan mayoritas berada pada tepi pantai menghadap laut.

Sarana Perkantoran

Sarana perkantoran di wilayah studi terdiri dari Kantor Pemerintahan dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kecamatan, kantor kejaksaan, kepolisian dan. Sarana perkantoran tersebar menyeluruh dalam wilayah studi, sehingga jangkauan dan aksesibilitas dari kawasan permukiman sangat terjangkau.

Sarana Ruang Terbuka

Sarana Ruang Terbuka di wilayah studi terdiri dari ruang terbuka hijau berupa lapangan, ruang terbuka tepian pantai, taman, dan ruang terbuka berupa kawasan pertanian dan hutan. Sarana ruang terbuka berupa lapangan tersebar pada seluruh wilayah namun dengan skala yang berbeda – beda. Untuk ruang terbuka tepian pantai terdapat pada depan istana mini yaitu Taman Wisata Pantai (TWP) Laut Banda. Untuk ruang terbuka berupa taman terdapat Taman Segitiga yang berada di depan Kantor Kecamatan Banda. Jangkauan dan aksesibilitas dari ruang terbuka dari kawasan permukiman sangat terjangkau.

Keberagaman (Diversity)

Komponen keberagaman dalam konteks kota 15 menit bertujuan mengintegrasikan pembangunan dengan berbagai fungsi, meningkatkan akses ke ruang terbuka hijau, dan mendorong interaksi sosial. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang dinamis dengan berbagai fasilitas. Jenis keberagaman pada wilayah studi lebih menitikberatkan pada keberagaman budaya.

Keragaman budaya yang merupakan pusaka tak benda merujuk pada warisan budaya yang tidak berwujud fisik, tetapi memiliki nilai sejarah, makna, dan penting bagi suatu masyarakat. Contohnya meliputi tradisi lisan, tarian, musik, upacara, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pusaka tak benda merupakan bagian penting dari kebudayaan yang perlu dilestarikan agar tidak hilang dari generasi ke generasi. Banda Neira yang Kaya akan warisan Budaya dan Sejarahnya juga memiliki berbagai jenis Pusaka Tak Benda sebagai bukti warisan budaya yang harus dilestarikan dari para leluhur. Adapun jenis keberagaman budaya di Pulau Neira yaitu:

Rofaer War

Rofaer War adalah upacara pembersihan sumur kampung secara massal oleh warga desa Lontor dalam rangka memenuhi tuntutan adat. Upacara ini merupakan upacara adat terbesar di Kepulauan Banda. Sumur yang dimaksud dalam proses pelaksanaan Rofaer War ini adalah sumur yang terletak di atas bukit kurang lebih sekitar 300 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman sekitar empat meter.

Upacara Adat membuka Kampong

Upacara Adat Buka Kampong, merupakan bagian dari ritual adat istiadat yang Buka kampong atau buka kampung dimaksudkan bukanlah membuka suatu perkampungan baru, tetapi maknanya pada kampung tersebut akan di buka pendidikan agama secara masal yang di konsepsikandalam bentuk kongkrit dan visual dalam suatu upacara adat.

Tarian Cakalele

Tarian Cakalele sendiri merupakan tarian yang sangat sakral, sehingga Tarian ini tidak dapat dipentaskan oleh orang luar, yang bukan bagian dari masyarakat adat di desa-desa kepulauan Banda. Tarian ini hanya boleh dilakukan oleh anak-anak adat desa setempat Tidak semua desa di kepulauan Banda memiliki tarian Cakalele karena tarian Cakalele hanya dimiliki oleh desa-desa adat. Dari 12 desa yang berada di Kepulauan Banda hanya delapan desa yang adalah desa adat. Perbedaan tarian Cakalele di Kepulauan Banda dengan tarian Cakalele di daerah lain di Maluku yaitu tarian Cakalele di banda diekspresikan dalam gerak dan lagu serta kostum yang khas bangsawan Banda.

Ritual Papaito

Ritual Papaito merupakan upacara tradisional yang dilakukan secara massal oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dibantu oleh orang tua adat desa tersebut. Ritual laut di Pulau Banda tidak hanya dilakukan oleh semua kampung adat memiliki ritual ini Ritual ini telah berlangsung dan menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang dan sampai saat ini masih tetap dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Ritual Papaito berawal dari satu kepercayaan dan keyakinan bahwa ada kdiidupan di laut.

Belang/ Kora-kora

Belang adalah armada perang rakyat banda. pada pesta tersebut di kibarkan bendera-bendera dari adat istiadat desa yang bergaris-garis. Selain itu, di bagian depan dan belakang perahu juga dihiasi dengan bendera tersebut. Belang kini digunakan untuk menyambut para tamu yang datang ke Kepulauan Banda. Selain itu juga, sering diadu dalam perlombaan antara kampung adat.

Digitalisasi (Digitalisation)

Kondisi digitalisasi di Pulau Neira, Kecamatan Banda, dalam penelitian ini dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti infrastruktur digital, akses internet, dan aplikasi layanan digital yang tersedia pada kawasan atau bangunan – bangunan bersejarah. Berikut adalah gambaran umum dari kondisi digitalisasi di Pulau Neira:

Infrastruktur Digital dan Akses Internet

Infrastruktur digital dan akses internet di Pulau Neira saat ini sudah cukup baik. Secara keseluruhan wilayah studi terlayani dan terpenuhi untuk jaringan telepon seluler dan akses internet 4G. ketersediaan infrastruktur digital dan akses internet ini tentunya akan membantu masyarakat dan wisatawan dalam mengakses atau mempromosikan potensi wisata alam, sejarah, dan budaya di Banda Neira.

Platform Digital Pendukung Pariwisata

Berdasarkan hasil survei lapangan, platform digital pendukung pariwisata yang ditempelkan di lapangan adalah QR yang memberikan informasi mengenai bangunan – bangunan bersejarah yang ada di Pulau Neira. QR ini tersebar di semua bangunan bersejarah yang ada dan dapat langsung discan oleh pengunjung.



a) Papan Informasi yang memuat QR

b) QR Informasi Bangunan Bersejarah

Gambar 1. Kondisi Digitalisasi di Pulau Neira

Analisis Peluang dan Tantangan Penerapan Konsep Kota 15 Menit di Pulau Neira

Analisis peluang dan tantangan penerapan konsep kota 15 menit dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan hasil analisis yang meliputi Analisis Kepadatan, Analisis Kedekatan, Analisis Keberagaman dan Analisis Digitalisasi. Secara lebih rinci penerapan konsep kota 15 menit di Pulau Neira akan disampaikan sebagai berikut

Aspek Kepadatan

Peluang Penerapan Konsep Kota 15 Menit di Pulau Neira Berdasarkan Aspek Kepadatan. Kepadatan penduduk yang tinggi dalam penerapan konsep kota 15 menit menciptakan beberapa peluang penting yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Berikut adalah beberapa peluang bagi wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dalam konsep kota 15 menit pada Pulau Neira:

Penggunaan Lahan yang Lebih Efisien

Pulau Neira dengan keterbatasan lahan, kepadatan penduduk yang tinggi memungkinkan penggunaan ruang yang lebih optimal, sehingga fasilitas penting seperti pasar, sekolah, klinik, dan obyek wisata dapat ditempatkan dalam jarak dekat serta memudahkan akses masyarakat.

Pengurangan Ketergantungan pada Transportasi Bermotor:

Dengan jarak yang lebih pendek antar lokasi dan kepadatan tinggi, masyarakat dan pengunjung di Pulau Neira dapat lebih mengandalkan transportasi berkelanjutan seperti berjalan kaki atau bersepeda.

Dukungan untuk Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Lokal:

Pulau Neira yang kecil menawarkan pasar yang besar untuk usaha-usaha kecil dan sektor pariwisata. Kegiatan ekonomi seperti toko suvenir, restoran lokal, dan pasar seni budaya dapat berkembang dengan baik, karena ada aliran konsumen yang konstan, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.

Optimalisasi Infrastruktur Pelabuhan dan Transportasi Air:

Kepadatan tinggi mendukung pengembangan layanan transportasi air seperti feri atau kapal penumpang yang lebih sering dan efisien, sehingga akses ke pulau-pulau sekitarnya menjadi lebih mudah, dan distribusi barang serta mobilitas penduduk lebih lancar.

Peningkatan Interaksi dan Aktivitas Komunitas

Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Neira memperkuat interaksi antarwarga, mendukung kegiatan komunitas seperti pasar malam, acara budaya, dan kegiatan olahraga yang dapat memperkuat ikatan sosial dan mendorong pariwisata.

Efisiensi Layanan dan Infrastruktur Publik

Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di satu area, maka layanan publik seperti klinik kesehatan, sekolah, dan pusat komunitas dapat diakses dengan mudah dan dikelola secara lebih efisien.

Kemudahan Implementasi Teknologi Lingkungan

Kepadatan tinggi memudahkan penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan air bersih dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Ini sangat penting di Pulau Neira untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak pada ekosistem laut.

Dukungan terhadap Budaya Berjalan Kaki dan Bersepeda

Pulau Neira dengan jarak yang pendek antar fasilitas mendukung pola hidup sehat melalui budaya berjalan kaki atau bersepeda. Ini mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas udara serta kesehatan warga.

Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan

Dengan kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan, Pulau Neira dapat fokus pada pariwisata yang berkelanjutan, seperti ekowisata dan wisata budaya, terlebih wisata yang fokus pada peninggalan bangunan bersejarah (cagar budaya). Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dapat lebih mudah mencapai visi kota 15 menit, di mana berbagai kebutuhan masyarakat tersedia dalam jangkauan dekat, dan lingkungan yang lestari tetap terjaga.

Tantangan Penerapan Konsep Kota 15 Menit di Pulau Neira Berdasarkan Aspek Kepadatan

Penerapan konsep kota 15 menit di Pulau Neira, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertama, keterbatasan lahan menghambat pembangunan fasilitas baru dan perluasan infrastruktur tanpa mengorbankan ruang terbuka atau lingkungan. Kedua, kepadatan berlebih menyebabkan overcrowding di fasilitas publik seperti sekolah dan transportasi, mengurangi kenyamanan layanan. Ketiga, meskipun jarak antar fasilitas dekat, jalan sempit sering kali menyebabkan kemacetan, sementara alternatif transportasi terbatas. Keempat, pencemaran lingkungan meningkat akibat volume sampah yang tinggi, berdampak negatif pada ekosistem lokal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya alam seperti air bersih dan lahan pertanian memperburuk situasi, mengakibatkan ketergantungan pada impor. Biaya hidup yang tinggi, akibat tingginya permintaan akan ruang hunian dan fasilitas, menjadi kendala bagi penduduk berpenghasilan rendah. Pulau Neira juga rentan terhadap bencana alam, di mana kepadatan tinggi dapat memperparah dampaknya dan menyulitkan proses evakuasi. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan air tidak dirancang untuk mendukung populasi besar, berpotensi menyebabkan gangguan layanan.

Konflik penggunaan lahan dapat muncul karena kebutuhan ruang untuk hunian, komersial, dan konservasi yang saling bertabrakan, terutama saat kepentingan ekonomi berbenturan dengan pelestarian bangunan bersejarah. Terakhir, tekanan pada ekosistem laut dan pantai akibat aktivitas masyarakat dapat mengakibatkan degradasi terumbu karang dan erosi pantai. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang efektif untuk mengatasi isu-isu tersebut dan memaksimalkan potensi wilayah dalam menerapkan konsep kota 15 menit.

Aspek Keberagaman

Peluang Penerapan Konsep Kota 15 Menit dari Aspek Keberagaman

Peluang yang ada di wilayah dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kental dalam konteks konsep kota 15 menit:

Pengembangan pariwisata budaya di wilayah dengan keberagaman budaya dan tradisi lokal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi. Kekayaan budaya ini tidak hanya dapat meningkatkan aktivitas bisnis lokal, seperti restoran, toko kerajinan, dan pertunjukan budaya, tetapi juga mendorong

partisipasi masyarakat dalam acara-acara lokal. Dengan melibatkan berbagai latar belakang budaya, keterlibatan komunitas akan semakin kuat, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup serta saling menghormati antarwarga.

Promosi seni dan kerajinan lokal juga berperan penting dalam mendukung ekonomi lokal. Keberadaan seni yang unik dapat dipamerkan melalui pasar dan pameran, menciptakan platform untuk ekspresi budaya. Selain itu, keberagaman budaya memberikan kesempatan untuk program pendidikan yang meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap tradisi dan praktik yang berbeda, memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat. Penyelenggaraan acara dan festival budaya dapat merayakan tradisi lokal sekaligus mempromosikan pariwisata, yang berfungsi sebagai pengalaman pengikat komunitas dan menarik pengunjung, sehingga meningkatkan bisnis lokal.

Dalam konteks ini, penguatan identitas lokal yang muncul dari merayakan keberagaman budaya dapat meningkatkan kepuasan penduduk dan menciptakan merek unik untuk wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat menarik penduduk dan bisnis baru. Kolaborasi dengan organisasi lokal dan kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan memastikan bahwa inisiatif mencerminkan nilai dan prioritas komunitas, mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Perencanaan kota yang inklusif juga penting, di mana ruang dirancang untuk mengakomodasi berbagai praktik budaya, menciptakan ruang publik yang memenuhi berbagai kebutuhan komunitas dan mendorong interaksi sosial.

Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan budaya, seperti pertunjukan dan pertemuan, dapat berfungsi sebagai titik fokus untuk keterlibatan komunitas. Keberagaman kuliner yang mencerminkan budaya yang berbeda akan meningkatkan scene kuliner di wilayah tersebut, tidak hanya mendukung bisnis lokal tetapi juga memberikan pengalaman bersantap yang bervariasi bagi penduduk dan pengunjung. Dengan memanfaatkan semua peluang ini, wilayah dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kaya dapat meningkatkan penerapan konsep kota 15 menit, menciptakan komunitas yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan secara ekonomi.

Tantangan Penerapan Konsep Kota 15 Menit dari Aspek Keberagaman

Tantangan yang mungkin dihadapi oleh wilayah dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kental dalam konteks konsep kota 15 menit:

Tantangan dalam menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks keberagaman budaya, sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antarbudaya, di mana perbedaan nilai dan norma antara kelompok budaya yang berbeda dapat memicu konflik. Ketegangan ini tidak hanya mengganggu harmonisasi sosial, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dalam interaksi antarwarga, yang dapat memperlebar jurang pemisah antara kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu, ketidakmerataan akses ke fasilitas juga menjadi masalah serius. Beberapa kelompok budaya mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat

integrasi masyarakat. Dalam hal ini, pergeseran identitas budaya akibat globalisasi dan urbanisasi juga perlu diperhatikan, karena hal tersebut dapat mengancam keberadaan tradisi dan praktik budaya lokal. Hilangnya identitas budaya tidak hanya mengurangi daya tarik wisata, tetapi juga mengurangi rasa memiliki di kalangan warga.

Stigma dan stereotip yang melekat pada masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda juga dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas. Stigma ini berpotensi mempengaruhi interaksi sosial, menciptakan jarak antara kelompok, dan menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Membedakan kebutuhan dan keinginan dari berbagai kelompok budaya dalam perencanaan kota bisa rumit, dan ini dapat mengarah pada konflik dalam pengalokasian sumber daya dan ruang publik.

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai nilai-nilai dan tradisi budaya lain dapat memperparah situasi ini. Ketidakhahaman masyarakat tentang keberagaman budaya dapat menghambat kolaborasi dan mengurangi partisipasi dalam acara budaya, mengakibatkan perpecahan dalam komunitas. Dari sisi ekonomi, ketergantungan pada pariwisata budaya membuat ekonomi lokal rentan terhadap perubahan tren, yang dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan yang tidak stabil bagi komunitas yang bergantung pada industri ini.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam mendukung acara budaya. Ruang publik yang tidak memadai dan fasilitas transportasi yang kurang dapat menghambat pelaksanaan acara dan aktivitas budaya, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menyebabkan ketidaklibatan beberapa kelompok, yang pada akhirnya mengarah pada pengembangan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan semua kelompok budaya. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dari pemerintah juga menghalangi upaya untuk mempromosikan keberagaman dan inklusivitas.

Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan kolaboratif. Kebijakan yang mendukung keberagaman budaya harus diterapkan untuk mewujudkan konsep kota 15 menit yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberagaman yang ada.

Aspek Digitalisasi

Peluang Penerapan Konsep Kota 15 Menit dari Aspek Digitalisasi

Peluang yang pasti ada di wilayah dengan keterbatasan digitalisasi dalam konteks konsep kota 15 menit:

Keterbatasan digitalisasi di suatu wilayah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan hubungan sosial antarwarga. Meskipun teknologi sering dianggap sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi, dalam konteks ini, keterbatasan akses digital justru mendorong warga untuk berinteraksi secara langsung. Interaksi tatap muka ini

memperkuat ikatan komunitas dan rasa solidaritas di antara penduduk, menciptakan lingkungan sosial yang lebih kohesif.

Selain itu, keterbatasan dalam digitalisasi juga meningkatkan fokus pada pengembangan infrastruktur fisik. Dengan mengutamakan pembangunan jalan dan transportasi umum, mobilitas masyarakat dapat didukung lebih baik, memastikan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan dan fasilitas. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penduduk dan mendorong perkembangan ekonomi lokal.

Dukungan terhadap usaha lokal juga semakin meningkat dalam situasi ini. Keterbatasan digitalisasi membuat masyarakat lebih berorientasi pada produk dan layanan yang dihasilkan secara lokal, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi setempat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kegiatan sosial dan budaya yang lebih aktif pun muncul sebagai hasil dari minimnya akses digital; masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam acara komunitas dan festival secara langsung, meningkatkan keterlibatan dan rasa kebersamaan.

Dalam hal pendidikan, keterbatasan digital memicu pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis offline, yang penting untuk meningkatkan keterampilan kerja penduduk. Fokus pada keberagaman sumber daya alam dan budaya lokal juga dapat meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi, menarik pengunjung dan memperkaya pengalaman komunitas.

Keterbatasan digital juga mendorong inisiatif komunitas untuk menciptakan solusi lokal dalam hal transportasi, distribusi barang, dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, wilayah tersebut dapat membangun hubungan dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki minat serupa, yang akan meningkatkan akses ke sumber daya dan dukungan dari luar komunitas.

Keterlibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan juga meningkat, dengan mereka aktif mengusulkan ide dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Terakhir, memprioritaskan kegiatan berbasis komunitas yang mengandalkan kolaborasi antarwarga, tanpa tergantung pada teknologi, akan memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan rasa memiliki di antara anggota komunitas. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, wilayah yang mengalami keterbatasan digitalisasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mewujudkan konsep kota 15 menit, dengan fokus pada keterlibatan sosial dan pengembangan komunitas.

Tantangan Penerapan Konsep Kota 15 Menit dari Aspek Digitalisasi

Tantangan yang pasti dihadapi oleh wilayah dengan keterbatasan digitalisasi dalam konteks konsep kota 15 menit:

Keterbatasan akses internet menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan digitalisasi di banyak wilayah. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan akses internet yang stabil dan cepat, sehingga menghambat integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kurangnya pengetahuan digital di kalangan penduduk juga membatasi partisipasi mereka dalam inisiatif digital

dan layanan berbasis teknologi. Tanpa keterampilan yang memadai, masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan transportasi dan fasilitas publik, juga dapat menghalangi akses yang lebih baik ke layanan digital. Keterbatasan ini sering kali menciptakan hambatan fisik yang sulit diatasi, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah menjangkau layanan yang tersedia. Di samping itu, tingginya biaya perangkat keras dan perangkat lunak menjadi penghalang bagi individu dan usaha kecil untuk mengadopsi teknologi digital, sehingga semakin memperlebar kesenjangan dalam akses terhadap teknologi.

Resistensi terhadap perubahan menjadi faktor lain yang menghambat proses digitalisasi. Masyarakat atau pemangku kepentingan mungkin enggan beradaptasi dengan inisiatif baru yang berbasis teknologi, yang bisa memperlambat implementasi program yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam hal pengembangan digitalisasi juga menghambat investasi dan perkembangan infrastruktur digital yang diperlukan.

Keterbatasan digital tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Mereka yang tidak terhubung secara digital mungkin merasa terpinggirkan, meskipun digitalisasi dapat meningkatkan interaksi sosial. Di samping itu, peningkatan penggunaan teknologi digital membawa risiko terkait keamanan data dan privasi, terutama jika tidak ada regulasi yang memadai untuk melindungi pengguna.

Kesenjangan digital menjadi masalah serius, di mana terdapat risiko ketimpangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan digital dengan yang tidak. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada. Terakhir, tanpa dukungan teknis dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program digital di tingkat komunitas sering menemui berbagai kendala, sehingga mencegah masyarakat dari merasakan manfaat penuh dari teknologi.

Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dalam konteks kota 15 menit, penting untuk memastikan bahwa semua warga dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi sambil tetap mempertahankan hubungan sosial yang kuat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, penguatan infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang memadai untuk mendorong investasi dalam pengembangan digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang mempengaruhi penerapan konsep kota 15 menit di wilayah studi. Pertama, dari segi kepadatan penduduk, variasi kepadatan menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan lebih tinggi, seperti Desa Dwiwarna, memiliki kebutuhan yang lebih besar akan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi jumlah penduduk yang banyak. Di sisi lain, daerah dengan kepadatan lebih rendah, seperti Desa Nusantara, menghadapi tantangan dalam memastikan aksesibilitas fasilitas tetap mudah dijangkau

meskipun jarak antar rumah lebih jauh. Oleh karena itu, penyesuaian perencanaan fasilitas berdasarkan kepadatan penduduk menjadi kunci untuk memastikan semua area mendukung prinsip kota 15 menit secara optimal.

Kedua, aspek kedekatan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah memiliki kedekatan yang memadai, memungkinkan masyarakat menjangkau fasilitas seperti pusat perbelanjaan, sekolah, taman, dan layanan kesehatan dalam waktu 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Hal ini mencerminkan bahwa tata letak dan distribusi fasilitas tersebut telah mendukung prinsip kota 15 menit, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, dan mendukung mobilitas berkelanjutan.

Selanjutnya, dari segi keberagaman, wilayah studi menunjukkan bahwa keberagaman ini tercermin dalam berbagai fasilitas publik, kegiatan sosial, dan tempat ibadah yang ada, yang mewakili beragam komunitas dan budaya. Dengan pendekatan ini, konsep kota 15 menit tidak hanya fokus pada kedekatan geografis, tetapi juga pada integrasi sosial yang menghargai keberagaman dan memperkuat hubungan antar komunitas.

Terakhir, aspek digitalisasi menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan teknologi digital yang mendukung kegiatan sehari-hari, seperti kurangnya sistem informasi digital di tempat-tempat publik. Keterbatasan ini menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan secara efisien dan mengurangi potensi peningkatan kualitas hidup yang dapat dicapai melalui teknologi. Untuk mendukung konsep kota 15 menit yang lebih optimal, diperlukan peningkatan penerapan teknologi digital yang menyentuh berbagai aspek kehidupan kota secara lebih merata dan terintegrasi. Dengan memperhatikan semua aspek ini, diharapkan wilayah studi dapat mengoptimalkan implementasi konsep kota 15 menit, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat

BIBLIOGRAFI

- Anuraga, J. L. Y. (2021). Jalur Rempah Banda, Antara Perdagangan, Penaklukan Dan Percampuran: Dinamika Masyarakat Banda Neira Dilihat Dari Sosio-Historis Ekonomi Rempah The Banda Spice Route, Between Trade, Conquest. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(3).
- Jahanmohan, T. (2016). *Identifying and Measuring Urban Design Qualities Related to Walkability – Special Reference to Jaffna Down Town. October.*
- Kastanya, H. (2016). REFLEKSI CULTURAL IMPERIALISM DALAM PENGGUNAAN BAHASA MEDIA LUAR RUANG DI KEPULAUAN BANDA NAIRA, MALUKU TENGAH [Cultural Imperialism Reflection in uses of the language on outdoor media in Banda Neira Island, Maluku]. *TOTOBUANG*, 4(1), 41–53.
- MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2015). *Geografické myslenie*. FHPV, PU v Prešove.
- Moreno, C. (2020). *The 15-minute city*. 1.
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratloug, F. (2021). Introducing the “15-minute city”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic

- cities. *Smart Cities*, 4(1), 93–111. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>
- Mulyadi, A. M., Santosa, W., & Salura, P. (2023). Walkability Assessment Based on the Tools for Walkable City Method. *Prosiding KRTJ HPJI*, 16(1), 1–12.
- Pahlevi, A., Agustina, S., & Yusuf, M. A. (2023). Identifikasi Kondisi Jalur Pedestrian dan Index Walkability di Kawasan Darussalam Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 7(4), 33–45.
- Ramadani, B. N., Delia, R. A., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Implementasi E-Musrenbang Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya dengan Pendekatan Problem Tree Analysis. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 140–149.
- Safira, E. (2022). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(3).
- Septirisa, L. (2021). *Kajian Penilaian Indeks Walkability Pada Kawasan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau.
- Sondakh, A. F. P. (2017). Metode Penilaian Walkability Permukiman di Perkotaan: Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2017.015.01.1>
- Spoon, S. C. (2005). *What Defines Walkability: Walking Behavior Correlates Core View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Carolina Digital Repository*.
- Surbakti, K. (2021). Pemanfaatan Tinggalan Kolonial di Pulau Neira, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku tengah sebagai upaya preservasi cagar budaya. *Forum Arkeologi*, 34(1), 51–66.
- Tanan, N., Wibowo, S. S., & Tinumbia, N. (2017). Pengukuran Walkability Index pada Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan (Walkability Index Measurement on Road Links in Urban Area). *Jurnal Jalan-Jembatan*, 34(2), 115–127.

Copyright holder:

Risal Rasyid, Pieter Thomas Berhиту, Elvira Florensia Metekohy (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

